LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/02/K/411.309/2026
TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Tribulan)		Sasaran/Program/outcome	Indikator Sasaran/ Program	Target (Tribulan)		Sasaran/Kegiatan /output	Indikator Sasaran/ Kegiatan	Target (Tribulan)		Aksi/ Pelaksanaan sub kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Tribulan)				Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
															I	II	III	IV		
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	10	11	12	13	15
1	Meningkatnya nilai tambah sektor Perindustrian dan Perdagangan"	Meningkatnya Nilai Produksi Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	TW I		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TW I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I	8	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	√	√	√	√	7.128.000	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				TW II				TW II				TW II	5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√	√	√	√		
				TW III				TW III	82,32			TW III	6	Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	√	√				
				TW IV				TW IV				TW IV	7							
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TW I		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	8.340.644.173	
												TW II		Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuagan SKPD	√	√	√	√		
												TW III		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	√					
												TW IV		koordinasi dan penyusunan laporan keuangn bulanan/triwulan/ semesteran SKPD						
										Administrasi Barang milik daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	TW I		Penatausahaan Barang Milik Dearah Pada SKPD	√	√	√	√	11.660.000	
												TW II								
												TW III								
												TW IV	1							
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	TW I		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√		675.721.650	
												TW II		Penyediaan bahan logistik kantor						
												TW III		Penyediaan barang cetakan dan pegadaan	√	√	√	√		
												TW IV	6	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√		
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√	√		
														Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	√	√	√		

										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TW I	1	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	√				20.990.000	
												TW II								
												TW III								
												TW IV								
										Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW I		penyediaan jasa surat menyurat	√				5.068.276.000	
												TW II		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	√	√	√	√		
												TW III		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	√	√	√	√		
												TW IV	3							
										Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	TW I		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	√	√	√	√	81.946.650,00	
												TW II		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas opeasional atau lapangan	√	√	√	√		
												TW III		Pemeliharan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√		
												TW IV								
		Meningkatnya Nilai Produksi Industri	Rasio PDRB industri pengolahan (%)																	
			Persentase peningkatan Nilai Produksi industri (%)	TW I	0,56															
				TW II	0,56															
				TW III	0,56															
				TW IV	0,56															
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)	TW I	1,69	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri	TW I		Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		2			51.000.000	Kepala Bidang Perindustrian
								TW II	1,88			TW II	2							
								TW III	2,07			TW III	2							
								TW IV	1,94			TW IV	1							
							Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik	TW I						Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1	121.500.000	Kepala Bidang Perindustrian
								TW II												
								TW III												
								TW IV	60											
							Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	TW I	0,56					Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			2		9.340.000	Kepala Bidang Perindustrian
								TW II	0,56											
								TW III	0,56											
								TW IV	0,63											
							Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi	TW I													
								TW II												
								TW III												
								TW IV	100											
							Persentase perwilayahan industri yang terbentuk	TW I													
								TW II	35											
								TW III												
								TW IV												

						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	TW I		Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi izin usaha industri (IUI)	TW I	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	2	2	2	2	5.925.000	Kepala Bidang Perindustrian
								TW II				TW II	2							
								TW III				TW III	2							
								TW IV	80			TW IV	2							
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS	TW I		Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyediaan informasi industri	TW I	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1		1	7.295.000	Kepala Bidang Perindustrian
								TW II				TW II	2							
								TW III				TW III	1							
								TW IV	25			TW IV	2							
														Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	1	1	10.690.000	Kepala Bidang Perindustrian
		Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Presentase peningkatan nilai sektor perdagangan	TW I		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	TW I		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan / Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	TW I	0						615.160.000	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
				TW II				TW II				TW II	1	1 unit pembangunan bedak tepi Pasar Sukomoro		V	V			
				TW III				TW III				TW III	0							
				TW IV				TW IV				TW IV	1	1 unit Pemeliharaan MCK Pasar Nganjuk 1			V	V		
										Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	TW I	0	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	V	V	V	V	127.988.000	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
												TW II	0	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	V	V	V	V		
												TW III	0	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	V	V	V	V		
												TW IV	1	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	V	V	V	V		
		Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan per-lengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	TW I	4%	Meningkatkannya ja-minan perlindungan kon-sumen melalui kepatuhan pemilik UTTP melakukan tera/tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Per-lengkapan Ditera Ulang (Unit)	TW I	358	Meningkatnya Kes-esualan Alat Ukur, alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ter-hadap Ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Per-lengkapan Ditera Ulang (Unit)	TW I	358	- Pembuatan KAK	V				24.540.500	Kepala Bidang Metrologi Legal
				TW II	4%			TW II	358			TW II	358	- Kegiatan tera ulang UTTP	V	V	V	V		
				TW III	42%			TW III	3759			TW III	3759	- Pelaksanaan sidang tera ulang UTTP di wilayah pasar di kabupaten nganjuk			V	V		
				TW IV	50%			TW IV	4475			TW IV	4475	- Pembuatan laporan hasil kegiatan	V	V	V	V		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	TW I	50 org			TW I	50 org			TW I	50 org	- Pembuatan KAK	V					Kepala Bidang Metrologi Legal

				TW II	150 org			TW II	150 org			TW II	150 org	- Melakukan pengawasan UTTP bagi pelaku usaha	√	√	√	√	25.355.000	
				TW III	400 org			TW III	400 org			TW III	400 org	- Melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha		√	√			
				TW IV	160 org			TW IV	160 org			TW IV	160 org	- Pembuatan laporan hasil kegiatan	√	√	√	√		
		Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase peningkatan Nilai sektor perdagangan (%)	TW I	1,02%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase Fasilitasi Ijin Usaha Perdagangan	TW I	8,33	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	TW I	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	√	√	√	√	3.450.000	Kepala Bidang Perdagangan
				TW II	1,47%			TW II	16,67			TW II	2							
				TW III	2,46%			TW III	41,67			TW III	4							
				TW IV	2,01%			TW IV	33,33			TW IV	3							
										Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase penerbitan rekomendasi izin usaha	TW I	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	√	√	10.315.000	Kepala Bidang Perdagangan
												TW II	0							
												TW III	1							
												TW IV	1							
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk	TW I	25	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	TW I	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	√	√	√	√	2.175.000	Kepala Bidang Perdagangan
								TW II	25			TW II	1							
								TW III	25			TW III	1							
								TW IV	25			TW IV	1							
														Pelaksana Operasi Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	√	√	√	√	14.813.500	Kepala Bidang Perdagangan
										Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TW I	25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	√	√	√	√	20.800.000	Kepala Bidang Perdagangan
												TW II	25							
												TW III	25							
												TW IV	25							
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk	TW I	0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	TW I	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		√	√	√	192.451.000	Kepala Bidang Perdagangan
								TW II	25			TW II	30							
								TW III	50			TW III	30							
								TW IV	25			TW IV	30							

Nganjuk, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680110 199412 2 002